

Pemberdayaan Perempuan Nelayan Melalui Literasi Keuangan

Dewi Indriasih^{1)*}, Dien Noviany Rahmatika²⁾, Suwandi³⁾, Aminul Fajri⁴⁾, Baihaqi Fanani⁵⁾, Jaka Waskita⁶⁾, Sumarno⁷⁾

^{1)*,2),4),5)}Program Studi Akuntansi, Universitas Pancasakti Tegal

^{3),6),7)} Program Studi Manajemen, Universitas Pancasakti Tegal
Jl. Halmahera No.KM. 01 / 52121

*Email Penulis Koresponden: dewi.indriasih@gmail.com

Received : 13/07/24; Revised: 19/08/24 ; Accepted: 22/08/24

Abstrak

Kepala Desa memiliki wewenang untuk meningkatkan perekonomian desa agar mencapai kemakmuran maksimal. Namun, banyak masyarakat desa terutama perempuan belum mandiri secara ekonomi. Mayoritas para perempuan tidak bekerja dan hanya mengandalkan pendapat suami yang bekerja sebagai nelayan. Sedangkan terkadang pendapat para nelayan tidaklah dapat dipastikan. Menilik dari kondisi ekonomi negeri yang semakin sulit terlihat dari semakin naiknya harga bahan-bahan pokok. Hal tersebut sering menjadi permasalahan keluarga nelayan yang menyebabkan para perempuan nelayan terjerat pinjaman ilegal. Selain itu terdapat bukti bahwa tingkat literasi keuangan profesi petani/nelayan memiliki tingkat terendah yaitu 20,75% yang sebelumnya ditahun 2016 sebesar 0%. Ibu rumah tangga sebesar 30,06%, di tahun 2016 sebesar 15,30%. Berdasarkan wilayah, Indeks literasi dan inklusi keuangan pedesaan sebesar 48,43 persen dan 82,69 persen yang lebih rendah dari wilayah perkotaan. OJK daerah mencatat, bahwa dari jumlah penduduk Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciyumajakuning), hanya sekitar 0,1%, dari empat juta jiwa yang memiliki literasi keuangan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keuangan perempuan nelayan melalui literasi keuangan dan pelatihan produksi pangan. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode ceramah, diskusi, dan praktik. Kegiatan pengabdian ini dapat dilaksanakan sesuai harapan atas bantuan semua pihak yang terlibat. Masyarakat selaku peserta sangat antusias untuk mengikuti kegiatan pengabdian ini. Tingkat pengetahuan peserta mengenai literasi keuangan meningkat sebesar 200% dan sebesar 197% untuk peningkatan pengetahuan mengenai pencatatan keuangan.

Kata kunci : Literasi Keuangan, Kemandirian Keuangan, Perempuan.

Abstract

The strategy includes Integration of PKHP policies, programs, and activities in the region. The majority of women do not work and only rely on the income of their husbands who work as fishermen. While sometimes the income of fishermen cannot be ascertained. Looking at the increasingly difficult economic conditions of the country, it can be seen from the increasing prices of basic necessities. This is often a problem for fishermen's families which causes women fishermen to be trapped in illegal loans. In addition, there is evidence that the level of financial literacy of the farmer/fisherman profession has the lowest level, namely 20.75%, which was previously 0% in 2016. Housewives are 30.06%, in 2016 it was 15.30%. The regional OJK noted that of the population of Cirebon, Indramayu, Majalengka, and Kuningan, only around 0.1% of the four million people have financial literacy. This activity aim to increase the financial independence of fisherwomen through financial literacy and food production training. The methods used in this service are lecture, discussion, and practice. This activity can be carried out as expected with the assistance of all parties involved. All the participants are very enthusiastic about participating in this community service activity. The materials and training provided have been implemented very appropriately. The participants' knowledge level on financial literacy increased by 200% and by 197% for the increase in knowledge on financial record keeping.

Keywords : Financial Literacy, Financial Independence, Women.

1. PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

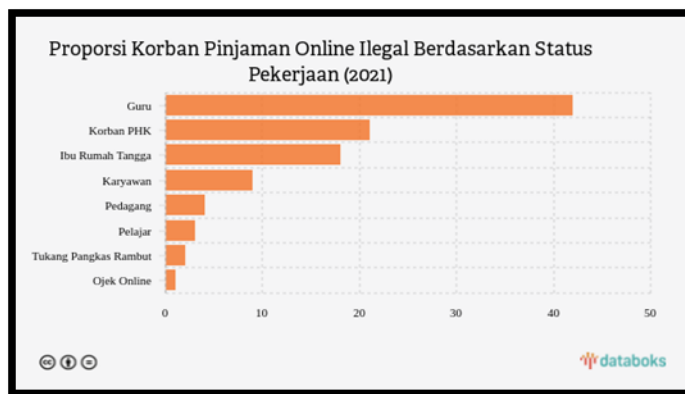
Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mendorong partisipasi seluruh unsur masyarakat untuk membangun desa. Kebijakan ini menjadi momentum bagi perempuan desa untuk berperan secara optimal dalam rangka mengubah posisinya dari obyek menjadi subyek pembangunan. Misalnya perempuan juga bisa terlibat sebagai perangkat desa, ataupun menyumbangkan pemikiran serta berperan aktif dalam Pembangunan desa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, n.d.) Namun kenyataannya kaum Perempuan didesa belum mendapat pengakuan dalam hal peran mereka. Sebagai masyarakat marjinal bisa dikatakan kurang mendapatkan perhatian. Mereka terhambat dalam berekspresi, bersuara, dan mengajukan pendapat atas hal-hal yang dialaminya. Mereka tidak memiliki akses pada penentuan kebijakan desa. Apalagi mereka dengan kategori warga miskin, dan kelompok difabel. meskipun hasil survey indeks literasi keuangan perempuan lebih tinggi yakni sebesar 50,33 persen dibanding laki-laki 49,05 persen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status pendapatan, partisipasi dalam pengambilan keputusan keuangan di tingkat rumah tangga dan penerima skema kesejahteraan sosial oleh perempuan mempunyai dampak yang signifikan terhadap pemberdayaan perempuan melalui inklusi keuangan; namun, keamanan tabungan mereka dianggap sebagai variabel yang tidak signifikan, namun nilai ganjilnya sangat tinggi (2,437) dalam penelitian ini (Pal et al., 2021). Fakta menunjukkan bahwa perempuan ingin menghidupi diri sendiri tanpa bantuan keuangan keluarga, memiliki kebebasan keuangan, bebas dari hutang, dan memiliki dana untuk pengeluaran tak terduga. Namun tantangan yang dihadapi adalah, meningkatnya biaya hidup, biaya pendidikan keluarga, upah yang stagnan. Hasil kajian memberikan beberapa pendapat misalnya, literasi keuangan bermanfaat bagi kesadaran dan kemandirian, serta mampu membuat perencanaan keuangan (Srivastava, 2020).

Meningkatnya perempuan miskin adalah akibat mengalami ketidak-adilan dalam akses sumber daya keuangan, akses kepemilikan aset, pekerjaan, warisan, dan lain-lain (Holloway et al., 2017). Banyak wanita menyerahkan keputusan keuangan utama kepada anggota keluarga laki-laki dan hanya sedikit yang punya waktu untuk mencermati, membaca, dan memahami seluk beluk tabungan dan investasi (Raviprasad, 2019). Bahwa perempuan yang menjadi korban kekerasan fisik, psikologis, dan pelecehan seksual dapat dikurangi melalui kemandirian keuangan (Li et al., 2022). Studi literatur juga menjelaskan bahwa sistem hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian finansial bagi perempuan (Rughoobur-Seetah et al., 2022).

Di sisi lain, indeks inklusi keuangan laki-laki lebih tinggi yakni sebesar 86,28 persen, dibanding perempuan pada angka 83,88 persen. Selanjutnya Indeks literasi dan inklusi keuangan wilayah perkotaan masing-masing sebesar 50,52 persen dan 86,73 persen, lebih tinggi dibandingkan di wilayah perdesaan yakni sebesar 48,43 persen dan 82,69 persen. Berdasarkan jenis pekerjaan, profesi sebagai petani/nelayan menduduki tingkat terendah sebesar 20,75% sebelumnya ditahun 2016 sebesar 0%. Tingkat kesejahteraan nelayan sangat jauh dari kata mapan. Bahkan, menjadi salah satu profesi paling miskin di Indonesia. Mereka sangat mudah menjadi korban kejahatan keuangan, dan terancam lebih miskin akibat menjadi korban kejahatan keuangan. Sebagaimana data dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) terkait aduan kejahatan keuangan seperti produk investasi ilegal, pinjol dan gadai ilegal pada periode 2017 hingga Januari 2021 Ibu rumah tangga pada urutan ketiga menjadi korban pinjaman ilegal, setelah guru dan korban PHK (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Berikut adalah data proporsi korban pinjaman online ilegal berdasarkan status pekerjaan pada tahun 2021 yang disajikan dalam bentuk grafik.



Gambar 1. Proporsi Korban Pinjaman Online Ilegal Berdasarkan Status Pekerjaan

Literasi keuangan yang rendah menyebabkan banyak perempuan nelayan menjadi korban kejahatan keuangan dan berakibat pada rendahnya kemandirian keuangan. Perlu penguatan kemandirian keuangan, seperti dukungan pemerintah dan subsidi kerugian nelayan, pelatihan bisnis, serta kampanye keselamatan kerja bagi keluarga nelayan (Afriana et al., 2022). Melakukan kajian untuk mengetahui penyebab terjadinya kerapuhan keuangan terutama disaat krisis ekonomi (Bialowolski et al., 2021). Literasi keuangan dapat diraih melalui pendidikan dan pengetahuan keuangan yang digunakan untuk mendapatkan akses pekerjaan, bekal untuk wirausaha dan kesejahteraan keluarga. Selanjutnya akan terhindar dari permasalahan keuangan dan kemiskinan yang menunjukkan kemandirian keuangan (Indriasih et al., 2023).

Pemberdayaan perempuan memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan bisnis atau kewirausahaan, meskipun hal ini banyak dilakukan melalui kelompok swadaya (*self help group*/SHG) agar lebih efektif dan terarah (Vukovic et al., 2021). Karena SHGs sangat penting dalam mencapai pemberdayaan perempuan pedesaan secara multidimensi. Bahwa pemberdayaan perempuan dicapai melalui partisipasi dalam SHGs (Mahato & Jha, 2024). Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya penguatan modal sosial, harkat dan martabat golongan warga tertentu yang mengalami kondisi kemiskinan dan keterbelakangan (Sudarmanto, 2020).

Sehingga perlu ada strategi pemberdayaan khususnya bagi kaum perempuan pada keluarga nelayan. Pemberdayaan, merupakan upaya meningkatkan kemampuan perempuan memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri, mampu berperan dan berpartisipasi aktif. Pelatihan pembuatan laporan keuangan sederhana akan berdampak pada bisnis umkm (Veronica et al., 2023)

1.2 Permasalahan Mitra

Masalah utama yang dihadapi oleh para perempuan nelayan adalah rendahnya tingkat kemandirian keuangan. Mayoritas para perempuan tidak bekerja dan hanya mengandalkan pendapat suami yang bekerja sebagai nelayan. Sedangkan terkadang pendapat para nelayan tidaklah dapat dipastikan. Menilik dari kondisi ekonomi negeri yang semakin sulit terlihat dari semakin naiknya harga bahan-bahan pokok. Hal tersebut sering menjadi permasalahan keluarga nelayan yang menyebabkan para perempuan nelayan terjerat pinjaman ilegal. Permasalahan yang lain yaitu tingkat literasi keuangan yang rendah sehingga menyebabkan para perempuan nelayan tidak dapat menentukan skala prioritas pengeluaran yang sehat dan tidak memiliki perencanaan keuangan yang baik.

2. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN

Bentuk dari program pengabdian masyarakat ini adalah pemberdayaan perempuan nelayan melalui literasi keuangan. Adapun metode pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

a. Metode Ceramah

Dalam kegiatan ini tim pengabdian masyarakat memberikan pemahaman mengenai literasi keuangan kepada para perempuan nelayan. Para perempuan diberikan pengetahuan tentang apa itu literasi keuangan, bagaimana melakukan pencatatan keuangan dasar. Dalam kegiatan ini, kami

tim pengabdian masyarakat menggunakan slide Ms. Powerpoint sebagai media penyampaian selama proses sosialisasi.

b. Metode Diskusi

Selain tutorial dan praktik kami tim pengabdian masyarakat juga menggunakan metode diskusi. Perempuan nelayan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan literasi keuangan dan pencatatan keuangan dasar. Kemudian narasumber akan menanggapi permasalahan yang disampaikan oleh peserta sehingga terjadi diskusi yang aktif dan timbal balik.

c. Metode Praktik

Tim pengabdian masyarakat selain memberikan materi juga memberikan praktik atau pelatihan. Pelatihan yang diberikan berupa tutorial / cara memproduksi produk pangan secara kreatif. Pelatihan ini akan didasarkan pada bahan pangan yang tersedia di setiap desa, sehingga akan dibuat pelatihan produk pangan yang berbeda-beda di setiap desa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian telah dilaksanakan pada bulan Mei dan Juni 2024. Kegiatan ini berlangsung dengan sangat lancar dibantu oleh beberapa kader PKK. Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama beberapa hari di beberapap desa. Setiap desa diberikan pelatihan produksi pangan yang berbeda. Selain itu, mereka yang telah memiliki usaha juga diberikan pelatihan pencatatan keuangan untuk mempermudah memantau keuangan usaha kecil yang dimilikinya.

Kader PKK akan mengumpulkan warga peserta pelatihan di salah satu rumah warga. Setelah berkumpul, kegiatan akan dibuka oleh tim pengabdian kemudian akan dilanjutkan oleh narasumber yang juga akan memberikan pelatihan produksi pangan. Semua alat dan bahan disiapkan oleh tim pengabdian sesuai arahan narasumber.

Sebelum diberikan pelatihan produksi pangan, narasumber akan sedikit memberikan materi mengenai literasi keuangan dan pencatatan keuangan dasar. Materi ini yang nantinya akan berguna untuk mereka ketika usaha yang peserta miliki mulai berkembang. Selama pemberian materi, narasumber akan secara spontan memberikan pertanyaan kepada peserta mengenai pengetahuan mereka tentang literasi keuangan dan pencatatan keuangan yang digunakan sebagai *pre-test*.

Dalam kegiatan tersebut juga peserta diajak untuk bersama-sama mempraktekkan produksi pangan yang diajarkan. Hasil produksi pangan tersebut selanjutnya dapat dibawa ke rumah masing-masing. Selain itu, narasumber juga akan memberikan materi mengenai pengemasan dan promosi produk pangan untuk membuat masyarakat tertarik untuk membeli produk pangan yang dihasilkan.

Setelah kegiatan selesai, tim pengabdian akan melakukan evaluasi terhadap peserta mengenai pelatihan dan materi yang telah diberikan oleh narasumber. Evaluasi dilakukan dengan memberikan kuesioner sebagai *post test* mengenai materi dan pelatihan yang telah diberikan.

Berikut dokumentasi hasil pembuatan camilan sampai hingga pengemasan.



Gambar 2. Hasil pelatihan produk pangan bersama narasumber
Hasil pembuatan pelatihan pembuatan pepes ikan.



Gambar 3. Hasil pelatihan produk pangan bersama narasumber
Persiapan awal pengumpulan peserta di salah satu rumah warga dan pendataan peserta
sebelum dilanjutkan dengan penyampaian materi penting oleh narasumber.



Gambar 4. Persiapan penyampaian materi oleh tim pengabdian

Dokumentasi antara tim pengabdian, narasumber dan para peserta dari salah satu desa.



Gambar 5. Dokumentasi antara tim pengabdian bersama para peserta pelatihan

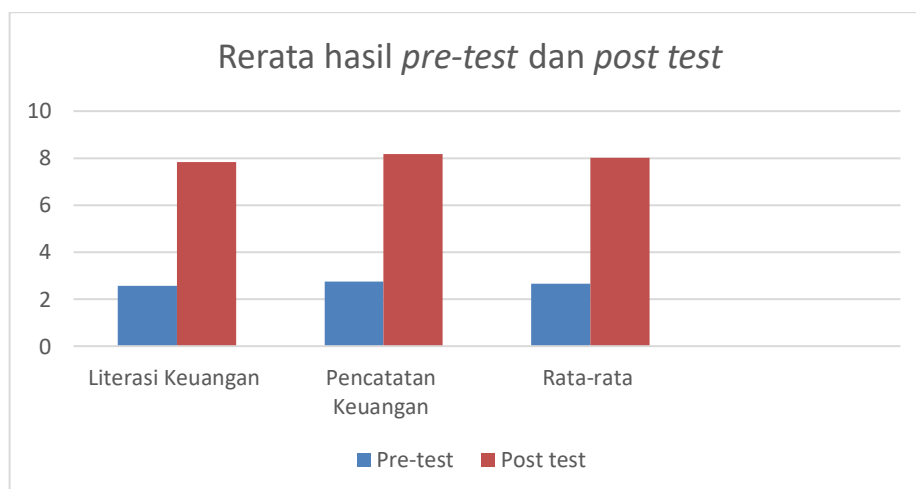
3.2 Luaran yang Dicapai

Sesuai luaran yang diharapkan dari kegiatan pengabdian yang telah dilakukan, maka berikut luaran yang dapat dicapai setelah kegiatan pengabdian selesai dilaksanakan. Berdasarkan hasil *post test*, diketahui bahwa pemahaman peserta mengenai literasi keuangan meningkat dari sebelum diberikan materi. Begitu juga pemahaman peserta mengenai pencatatan keuangan dasar yang juga meningkat dari hasil *pre-test*.

Berikut adalah data hasil *pre-test* dan *post test* para peserta sebagai tolak ukur pengetahuan para peserta mengenai materi literasi keuangan dan pencatatan keuangan.

Tabel 1. Rerata hasil *pre-test* dan *post test*

Materi	<i>Pre-test</i>	<i>Post test</i>
Literasi Keuangan	2.56	7.84
Pencatatan Keuangan	2.74	8.18
Rata-rata	2.65	8.01



Grafik 1. Rerata hasil *pre-test* dan *post test*

Untuk evaluasi pelatihan produk pangan, peserta sudah sangat memahami seluruh tata cara pembuatan produk pangan yang telah diajarkan. Secara keseluruhan pemahaman peserta setelah pemberian materi dan pelatihan menjadi meningkat.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini dapat dilaksanakan sesuai harapan atas bantuan semua pihak yang terlibat. Masyarakat selaku peserta sangat antusias untuk mengikuti kegiatan pengabdian ini. Materi dan pelatihan yang diberikan sudah sangat tepat dilaksanakan. Para peserta merasa sangat terbantu dengan penyampaian materi mengenai literasi keuangan dan pencatatan keuangan. Peningkatan pengetahuan peserta dapat dilihat pada grafik rerata hasil *pre-test* dan *post test*, di mana presentase kenaikan pengetahuan peserta mengenai literasi keuangan meningkat sebanyak 200%, dan presentase kenaikan pengetahuan peserta mengenai pencatatan keuangan meningkat sebanyak 197%. Dapat kita ketahui bahwa pengetahuan peserta mengenai literasi keuangan dan pencatatan keuangan masih sangat rendah.

Disarankan bagi pemerintah dapat dilakukan kegiatan pengabdian secara rutin terutama pengabdian kepada target perempuan. Kegiatan pengabdian yang dapat meningkatkan nilai perempuan, pengabdian yang dapat meningkatkan keikutsertaan perempuan dalam memajukan ekonomi keluarga dan juga ekonomi daerah. Bagi peneliti juga dapat melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan di kalangan perempuan dengan status ibu rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriana, W., Abdulkadir, A., & Azis, H. (2022). Covid-19 Pandemic and Welfare of Fishermen Kamal Muara. *Journal of Business and Behavioural Entrepreneurship*, 5(2), 32–40. <https://doi.org/10.21009/jobbe.005.2.05>
- Bialowolski, P., Weziak-Bialowolska, D., & McNeely, E. (2021). The Role of Financial Fragility and Financial Control for Well-Being. *Social Indicators Research*. <https://doi.org/10.1007/s11205-021-02627-5>
- Holloway, K., Niazi, Z., & Rouse, R. (2017). Financial Inclusion Program Innovations for Poverty Action Women's Economic Empowerment Through Financial Inclusion A Review of Existing Evidence and Remaining Knowledge Gaps. www.poverty-action.org
- Indriasih, D., Mulyantini, S., Fajri, A., & Rimbawan, T. (2023). Bridging the gender gap: women in fisheries industry policy on the North Coast of West Java, Indonesia. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(3).
- Li, C., Liu, J., & Chen, X. (2022). Chinese Women's Financial Independence and Their Intimate Partner Violence Victimization Experiences. *Violence against Women*, 29, 10778012221097144. <https://doi.org/10.1177/10778012221097143>
- Mahato, J., & Jha, M. K. (2024). Does social capital promote sustainable livelihood? Mediating effect of women entrepreneurship. *International Journal of Sociology and Social Policy*. <https://doi.org/10.1108/ijssp-09-2023-0234>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). OJK dan Satgas Waspada Investasi Ungkap Dua Kasus Investasi Ilegal dan Satu Penipuan Pelunasan Kredit. <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/siaran-pers/Pages/OJK-dan-Satgas-Waspada-Investasi-Ungkap-Dua-Kasus-Investasi-Ilegal-dan-Satu-Penipuan-Pelunasan-Kredit.aspx>
- Pal, M., Gupta, H., & Joshi, Y. (2021). Social and economic empowerment of women through financial inclusion: empirical evidence from India. *Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal*, 41, 294–306. <https://doi.org/10.1108/EDI-04-2021-0113>
- Raviprasad, S. (2019). A study of financial independence of women with reference to innovations in banking system. *International Journal of Social and Economic Research*. <https://doi.org/10.5958/2249-6270.2019.00051.5>
- Rughoobur-Seetah, S., Hossanoo, Z., & Soupramanien, L. (2022). Financial independence of women – the impact of social factors on women empowerment in small island developing states (SIDS). *International Journal of Organizational Analysis*, 31. <https://doi.org/10.1108/IJOA-10-2021-2980>
- Srivastava, A. (2020). ROLE OF FINANCIAL INDEPENDENCE IN UPLIFTING THE STATUS OF WOMEN. *IJCIRAS*, 3(7).

- Sudarmanto, E. dkk. (2020). Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan. Yayasan Kita Menulis .
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. (n.d.). Undang-Undang tentang Desa.
- Veronica, M., Pebriani, R. A., Romli, H., Romli, H., Romli, H., & Romli, H. (2023). PELATIHAN PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN SEDERHANA PADA USAHA KEMPLANG PANGGANG DI SEBERANG ULU PELEMBANG. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 6(3).
<https://doi.org/10.36982/jam.v6i3.2704>
- Vukovic, D., Petrović, M., Maiti, M., & Vujko, A. (2021). Tourism development, entrepreneurship and women's empowerment – Focus on Serbian countryside. *Journal of Tourism Futures*, 1–21.